

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

---

MEMORANDUM  
NOMOR 128/PSDKP.4/TU.140/I/2025

Yth. : Direktur Jenderal PSDKP  
Dari : Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2024  
Lampiran : Satu Berkas  
Tanggal : 23 Januari 2025

---

Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024, terlampir kami sampaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Direktur Jenderal PSDKP kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

**Halid K. Jusuf**

Tembusan:  
Sesditjen PSDKP



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2024

# LAPORAN TAHUNAN

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan

DISUSUN OLEH:

Tim Pelaporan Dit. PSDP Tahun 2024



Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan (PSDP) dalam mencapai tujuan dan sasaran selama tahun 2024. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan ini merupakan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Masukan, tanggapan, serta saran yang membangun bagi pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan sangat dibutuhkan untuk dijadikan perbaikan dalam pencapaian target kinerja Direktorat PSDP di masa depan.

Jakarta, 20 Januari 2025

Direktur Pengawasan

Sumber Daya Perikanan,



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Halid K. Jusuf

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan Ekonomi Biru Kelautan dan Perikanan diarahkan melalui penguatan ekosistem pendukung termasuk sinkronisasi kebijakan hulu dan hilir, tata kelola dan kelembagaan, regulasi pengelolaan sumber daya kelautan, serta pembiayaan biru (*blue financing*). Dalam hal ini, upaya Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan di era UUCK dalam mendukung kebijakan ekonomi biru membantu memastikan pelaksanaan kegiatan usaha perikanan yang sesuai dengan standar melalui pendekatan berbasis risiko guna menciptakan kepatuhan pelaku usaha perikanan melalui program prioritas pengawasan penangkapan ikan terukur (PIT) yang berbasis kuota dan pembangunan kampung budidaya berbasis kearifan lokal.

Selama periode tahun 2024, Direktorat PSDP telah berhasil mencapai seluruh target yang ditetapkan dengan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **112,22%** dengan kategori Istimewa. Pencapaian Nilai Pemahaman Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan yang Bertanggung Jawab sebesar **79,47**. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan sebesar **100%**. Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional sebesar **100**. Nilai Kualitas Penyelesaian Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan sebesar **100**. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan sebesar **100%**. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP sebesar **80,67**. Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO) sebesar **86,09**.

Kemudian, pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan substansi teknis dalam sanksi administrasi perikanan sebesar **93%**. Nilai penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDP sebesar **100**. Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat PSDP sebesar **82**. Inovasi pengawasan sumber daya perikanan yang dihasilkan sebanyak **1** inovasi. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PSDP sebesar **100%**. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PSDP sebesar **84,34**. Nilai Pengawasan Arsip Internal lingkup PSDKP sebesar **96,16**. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PSDP sebesar **87,25**. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat PSDP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan sebesar **100%**. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Direktorat PSDP sebesar **78,9**. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat PSDP sebesar **132,29%**. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Direktorat PSDP sebesar **100**. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat PSDP sebesar **100**. Realisasi anggaran sebesar **99,76%**.

Direktorat PSDP memiliki alokasi anggaran awal TA 2024 sebesar Rp11,768,640,000. Setelah mengalami *Automatic Adjustment* (AA) 1 kali kemudian dana tersebut dialihkan ke satuan kerja lain sehingga total anggaran Direktorat PSDP menjadi Rp10,068,640,000. Pada tahun 2024 telah dilakukan revisi POK sebanyak 8 kali dan diperoleh nilai efisiensi sebesar **9,60%**.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sehingga dapat meningkatkan pencapaian kinerja pengawasan sumber daya perikanan di periode berikutnya.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	2
DAFTAR ISI .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>5</b>
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	5
2.2 PERJANJIAN KERJA .....	10
2.3 TARGET KINERJA.....	14
2.4 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA.....	16
2.5 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA .....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>20</b>
3.1 CAPAIAN KINERJA.....	20
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA .....	22
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	68
3.4 EFISIENSI .....	68
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>
1. PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PSDP TAHUN 2024 AWAL .....	72
2. PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PSDP TAHUN 2024 AKHIR .....	73
3. PENGHARGAAN DIREKTORAT PSDP TAHUN 2024.....	74

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pengawasan sumber daya perikanan dilaksanakan oleh Satker Pusat dan Satker UPT. Satker Pusat memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sumber daya perikanan.

Objek pengawasan berupa pelaku usaha penangkapan ikan, pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, pelaku usaha pembudidayaan ikan dan pelaku usaha distribusi hasil perikanan yang merupakan sebuah alat produksi pengelolaan perikanan serta aktivitasnya bersinggungan dengan ketersediaan sumber daya. Konsepsi pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perikanan yang dibangun yaitu setiap alat produksi melakukan aktivitas usaha, maka pengawasan perikanan hadir guna memastikan aktivitas usaha tersebut sesuai ketentuan.

Peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan dapat dicapai melalui beberapa pendekatan, dimana salah satunya yaitu pendekatan preventif, partisipatif dan koordinatif. Rincian output koordinasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan menggambarkan sebuah upaya Satker pusat untuk melakukan pendekatan berupa koordinasi, baik internal dan eksternal dalam kerangka pengawasan perikanan. Adapun hasil akhir yang hendak dicapai berupa kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Direktorat PSDP tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan perikanan selama tahun 2024.

## 1.3 ISU AKTUAL PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

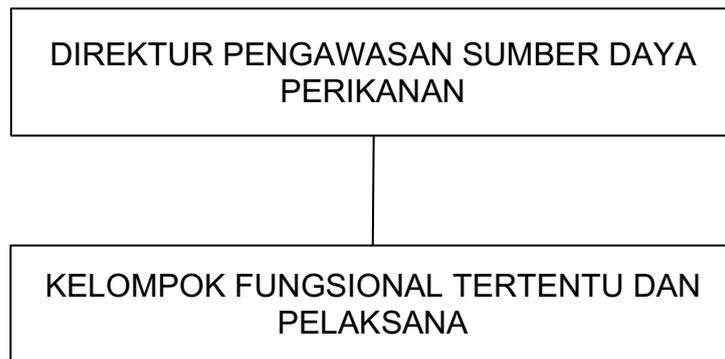
Isu aktual dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan tahun 2024 yang menjadi fokus pengawasan, antara lain:

1. *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF) di beberapa wilayah di Indonesia.
2. Maraknya kegiatan alih muat yang tidak sesuai ketentuan. Alih muat dari kapal PNBP Pasca produksi ke PNBP Pra Produksi.
3. Maraknya pelanggaran jalur penangkapan dengan mematikan VMS. Pelanggaran mematikan VMS lebih murah denda administrasinya daripada pelanggaran jalur.
4. Penyelundupan Benih Bening Lobster yang melibatkan jaringan kriminal terorganisir yang bekerjasama dengan mafia internasional.
5. Kegiatan pembudidayaan ikan yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan, kepatuhan terhadap regulasi, dan dampak terhadap lingkungan;
6. Peredaran ikan yang membahayakan dan merugikan di Wilayah Perikanan Indonesia yang sudah merusak ikan, lingkungan sumber daya ikan dan membahayakan manusia.
7. Kegiatan importasi hasil perikanan yang tidak sesuai dalam hal waktu, jenis, jumlah dan peruntukannya sehingga mengancam kelangsungan hidup nelayan lokal dan keberlanjutan sektor perikanan.
8. Kegiatan pengolahan hasil perikanan yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan yang telah ditetapkan.

## 1.4 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PSDP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan (PSDP) sebagai salah satu bagian dari DJPSDKP mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sumber daya perikanan. Secara spesifik Direktorat PSDP melaksanakan fungsinya dibidang analisis data dan informasi intelijen perikanan, pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan sumber daya perikanan, pembinaan dan pengawasan teknis serta pengembangan sistem pengawasan sumber daya perikanan, pemantauan dan evaluasi pengawasan sumber daya perikanan.

Direktorat PSDP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 48 Pegawai Pusat terdiri atas 1 (satu) orang Direktur, Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Utama sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Madya sebanyak 3 (tiga) orang, Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda sebanyak 9 (sembilan) orang, Pejabat Fungsional Perencana Muda sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Perencana pertama 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Arsiparis Pelaksana 1 (satu) orang, Analis Pengawasan SDKP sebanyak 17 (tujuh belas) orang, Analis Keuangan sebanyak 1 (satu) orang, Pengelola Keuangan sebanyak 1 (satu) orang, Pengawas Perikanan yang tersebar di 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP serta 5 (lima) orang Pegawai Kontrak dan 4 (empat) orang PJLP.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PSDP

## 1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi Direktorat PSDP serta sistematika pelaporan.
- **Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan tentang sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja Direktorat PSDP, dan pengukuran capaian kinerja.
- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan tentang analisis dan evaluasi pencapaian kinerja.
- **Bab IV Penutup**, menyimpulkan secara menyeluruh Laporan Kinerja Direktorat PSDP Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi perbaikan di masa depan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja merupakan tahap awal dalam siklus penyelenggaraan SAKIP. Komponen Perencanaan kinerja yang disusun oleh Direktorat PSDP meliputi:

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Direktorat Jenderal PSDKP telah menetapkan Renstra tahun 2020 – 2024 yang merupakan penjabaran teknis secara berjenjang dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP sebagai salah satu unit Eselon I lingkup KKP. Renstra Ditjen. PSDKP memiliki nilai strategis karena merupakan tahapan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020 – 2024. Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP Tahun 2020 – 2024 berpedoman pada RPJMN 2020 – 2024 (Perpres 18 Tahun 2020) dengan memperhatikan arahan Presiden kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) serta mempertimbangkan arahan MKP kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen. PSDKP).

Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Pernyataan Visi dan Misi**

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang

mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi : “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”.

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen. PSDKP.

## **2. Isu Strategis Pengawasan Sumber Daya Perikanan**

Isu aktual dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan tahun 2024 yang menjadi fokus pengawasan yaitu pengawasan penangkapan ikan terukur (PIT) yang berbasis kuota, pembangunan kampung budi daya berbasis kearifan lokal, pengawasan importasi, pengawasan pengangkutan dan pemasaran

ikan, pengawasan pengolahan ikan, dan pelaksanaan pengawasan sesuai kewenangan.

### **3. Tujuan dan Sasaran**

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020 – 2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020 – 2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020 – 2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020 – 2024 sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Sasaran Program Ditjen. PSDKP 2021-2024

No.	Sasaran Strategis KKP (Akibat)	Sasaran Program Ditjen PSDKP (Sebab)	Keterangan
SS-6	Tata kelola SDKP bertanggung jawab	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP ikut berkontribusi menciptakan tata kelola SDKP yang bertanggung jawab
		Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	Meningkatnya kepatuhan pemangku kepentingan KP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab
SS-8	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif	Pemantauan dan Operasi Armada efektif	Efektifnya pemantauan dan operasi armada ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
		Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Tuntasnya penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
SS-9	Tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	Baiknya tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik pada lingkup KKP

#### 4. Indikator Kinerja

Sebagai penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP tahun 2020 – 2024 yang dijumpai oleh Arah Kebijakan, Strategi, dan Pengarusutamaan (*mainstreaming*) serta Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Ditjen. PSDKP tahun 2020 – 2024 maka disusunlah Kerangka Kinerja dan Pendanaan Ditjen. PSDKP tahun 2020 – 2024. Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP, Ditjen. PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

No.	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>						
1.	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat <i>Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)</i>	85	86	87	88	90
2.	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat <i>Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)</i>	94	95	96	97	98
3.	Pemantauan dan Operasi Armada efektif <i>Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)</i>	54,18	60	65	70	75
	<i>Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)</i>	86,72	87	87,5	88	89
4.	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas <i>Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan(%)</i>	93	93	93	93	93
<b>Program: Dukungan Manajemen</b>						
5.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP					
	<i>Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)</i>	30	31	32	33	34
	<i>Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)</i>	4	5	6	7	8
	<i>Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)</i>	1	1	1	1	1
	<i>Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)</i>	72	73	74	75	76
	<i>Nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)</i>	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75
	<i>Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)</i>	1	1	1	1	1
	<i>Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)</i>	3	3	3	3	3
	<i>Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)</i>	82	84	86	88	90
	<i>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)</i>	60	65	70	75	80
	<i>Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)</i>	88	89	89	90	90
	<i>Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)</i>	85	86	87	88	89

Direktorat PSDP sebagai salah satu bagian dari Direktorat Jenderal PSDKP, menetapkan Sasaran Strategis tahun 2020 – 2024 menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang disesuaikan dengan bisnis proses di Kementerian melalui penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran ke dalam suatu Peta Strategi dengan empat perspektif yang saling terkait, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customer*, perspektif *internal process*, dan perspektif *learn and growth*.

1) Perspektif Stakeholder

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan Organisasi untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu Organisasi.

## 2) Perspektif Customer

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan Organisasi untuk memenuhi harapan pengguna layanan (*customer*). Pengguna layanan (*customer*) adalah pihak eksternal yang terkait langsung dengan pelayanan organisasi.

## 3) Perspektif Internal *Process*

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola Organisasi, untuk memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan customer (*value chain*).

## 4) Perspektif *Learning and Growth*

Perspektif ini mencakup SS yang berupa kondisi sumber daya internal Organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh Organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* Organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan *stakeholder*.

## 2.2 PERJANJIAN KERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi pernyataan komitmen antara Pimpinan unit kerja dengan Pimpinan Unit kerja di atasnya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam periode waktu satu tahun. Perjanjian ini dibuat berdasarkan tugas, fungsi, serta wewenang yang dimiliki, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Pada awal Tahun 2024 ditetapkan 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja. Detail Indikator Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat PSDP Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
<b>KEGIATAN 1. PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN</b>			
SK1	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan sumber daya perikanan yang efektif	01 Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab (Nilai)	74
SK2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	02 Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen perikanan (%)	80
SK3	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	03 Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional (Nilai)	100
		04 Nilai kualitas penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	81
		05 Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan (%)	60
		06 Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan substansi teknis dalam sanksi administratif (%)	80
		07 Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan SDP (Nilai)	80
		08 Nilai keandalan sistem pengawasan kapal perikanan (eSLO) (Nilai)	75
		09 Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan (%)	100
		10 Tingkat pemahaman peserta Bimtek Pengawasan SDP (Nilai)	78
		11 Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Inovasi)	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
SK4	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Direktorat PSDP (%)	100
		13	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	75
		14	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat PSDP (Indeks)	82
		15	Penilaian mandiri SAKIP Direktorat PSDP (Nilai)	84
		16	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		17	Nilai implementasi program budaya kerja (Nilai)	21
		18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PSDP (%)	94
		19	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PSDP (%)	80
		20	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PSDP (%)	80
		21	Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat PSDP (%)	99,4

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perjanjian Kinerja dapat dilakukan jika terjadi pergantian atau mutasi pejabat, perubahan strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, dan/atau perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan Sasaran. Perjanjian Kinerja Direktorat PSDP telah mengalami 2x perubahan. Perubahan pertama terjadi karena pergantian pimpinan Eselon I pada Februari 2024. Selanjutnya Direktorat PSDP melakukan perubahan kedua karena pergantian Eselon II dan perubahan target indikator kinerja “Nilai implementasi program budaya kerja (Nilai)”

yang semula 21 menjadi 70. Adapun detail Indikator Kinerja Tahun 2024 akhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Direktorat PPSPD Tahun 2024 Final

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
<b>KEGIATAN 1. PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN</b>			
SK1	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan sumber daya perikanan yang efektif	01 Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab (Nilai)	74
SK2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	02 Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen perikanan (%)	80
SK3	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	03 Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional (Nilai)	100
		04 Nilai kualitas penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	81
		05 Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan (%)	60
		06 Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan substansi teknis dalam sanksi administratif (%)	80
		07 Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan SDP (Nilai)	80
		08 Nilai keandalan sistem pengawasan kapal perikanan (eSLO) (Nilai)	75
		09 Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan (%)	100
		10 Tingkat pemahaman peserta Bimtek Pengawasan SDP (Nilai)	78
		11 Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Inovasi)	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
SK4	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Direktorat PSDP (%)	100
		13	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	75
		14	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat PSDP (Indeks)	82
		15	Penilaian mandiri SAKIP Direktorat PSDP (Nilai)	84
		16	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		17	Nilai implementasi program budaya kerja (Nilai)	70
		18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PSDP (%)	94
		19	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PSDP (%)	80
		20	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PSDP (%)	80
		21	Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat PSDP (%)	99,4

### 2.3 TARGET KINERJA

Target Kinerja adalah standar minimal pencapaian Kinerja yang ditetapkan untuk periode tertentu. Penetapan Target Kinerja merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan serta mempertimbangkan usulan pengelola Kinerja Organisasi. Rincian Target kinerja Direktorat PSDP Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Rincian Target Kinerja Dit. PSDP Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	POLA AKUMULASI PERHITUNGAN TARGET	TARGET 2024						
			TW I	TW II	s.d SMT 1	TW III	TW IV	s.d SMT 2	
SK 1	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan sumber	01	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang	0	0	0	0	74	74

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	POLA AKUMULASI PERHITUNGAN TARGET	TARGET 2024						
			TW I	TW II	s.d SMT 1	TW III	TW IV	s.d SMT 2	
	daya perikanan yang efektif	bertanggung jawab (Nilai)							
SK 2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	02 Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen perikanan (%)	Persentase Posisi Akhir	0	0	0	0	80	80
SK 3	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	03 Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional (Nilai)	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	100	100
		04 Nilai kualitas penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	Nilai Posisi Akhir	81	81	81	81	81	81
		05 Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan (%)	Persentase Posisi Akhir	20	40	40	50	50	60
		06 Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan substansi teknis dalam sanksi administratif (%)	Persentase Posisi Akhir	0	80	80	0	80	80
		07 Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan SDP (Nilai)	Rata-rata	0	0	0	0	80	80
		08 Nilai keandalan sistem pengawasan kapal perikanan (eSLO) (Nilai)	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	75	75
		09 Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan (%)	Persentase Posisi Akhir	0	50	50	0	100	100
		10 Tingkat pemahaman peserta Bimtek Pengawasan SDP (Nilai)	Nilai Posisi Akhir	0	60	60	0	78	78
		11 Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Inovasi)	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	1	1
SK 4	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12 Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Direktorat PSDP (%)	Rata-rata	100	100	100	100	100	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	POLA AKUMULASI PERHITUNGAN TARGET	TARGET 2024						
			TW I	TW II	s.d SMT 1	TW III	TW IV	s.d SMT 2	
	1 3	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	75	75
	1 4	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat PSDP (Indeks)	Nilai Posisi Akhir	0	77	77	0	82	82
	1 5	Penilaian mandiri SAKIP Direktorat PSDP (Nilai)	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	84	84
	1 6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	Rata-rata	80	80	80	80	80	80
	1 7	Nilai implementasi program budaya kerja (Nilai)	Nilai Posisi Akhir	0	0	0	0	21	21
	1 8	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PSDP (%)	Rata-rata	94	94	94	94	94	94
	1 9	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PSDP (%)	Persentase Posisi Akhir	0	0	0	0	80	80
	2 0	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PSDP (%)	Persentase Posisi Akhir	0	0	0	0	80	80
	2 1	Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat PSDP (%)	Persentase Posisi Akhir	0	0	0	0	99.4	99.4

## 2.4 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

Rencana aksi merupakan dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai target, yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan. Rencana aksi bersifat spesifik dan berjumlah lebih dari satu. Rencana aksi kegiatan Direktorat PSDP adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5. Rencana Aksi Pencapaian Kegiatan Direktorat PSDP Tahun 2024

KEGIATAN PENDUKUNG (OUTPUT/KOMPONEN RKAKL)	ANGGARAN /PAGU (RP 000)	SATUAN OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN PER BULAN												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya Perikanan	500.000	orang	300					200			100					
1   Perencanaan sosialisasi dan diseminasi	40.000															

KEGIATAN PENDUKUNG (OUTPUT/KOMPONEN RKAHL)	ANGGARAN /PAGU (RP 000)	SATUAN OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN PER BULAN												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
2 Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi	399.578															
3 Evaluasi sosialisasi dan diseminasi	60.422															
Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	123.580	operasi	2												1	1
1 Persiapan	9.000															
2 Pengumpulan Data dan informasi (Pulbaket)	110.930															
3 Evaluasi dan Pelaporan	3.650															
Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	677.220	Lembaga	15				2	2	2	2	2	2	2	2	1	
1 Perencanaan/persiapan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	11.550															
2 Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	662.414															
3 Monev dan pelaporan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	3.256															
Hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha yang dipantau	2.046.215	laporan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1 Perencanaan pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan	228.841															
2 Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan	1.142.246															
3 Monev Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan	675.128															
Hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha yang dipantau	879.124	laporan	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1 Tindak lanjut/pemantauan dan penilaian kepatuhan	879.124															
Hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha yang dipantau	879.124	laporan	4				1				1					1
1 Tindak lanjut/pemantauan dan penilaian kepatuhan	879.124															
Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumber daya Perikanan	2.885.670	kegiatan	3						1		1				1	
1 Perencanaan koordinasi pelaksanaan pengawasan sumber daya Perikanan	248.190															
2 Pelaksanaan koordinasi pengawasan sumberdaya Perikanan	2.543.274															
3 Monitoring dan evaluasi koordinasi pengawasan Perikanan	94.206															
Hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha yang dipantau	898.932	laporan	4			1			1				1			1
1 Perencanaan pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan	236.100															
2 Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan	662.832															
NSPK pengawasan sumber daya Perikanan	788.000	nspk	3					1			1				1	
1 Perencanaan draft/rancangan NSPK	49.850															
2 Penyusunan draft/rancangan NSPK	526.960															
3 Sosialisasi draft/rancangan NSPK	138.070															
4 Monitoring dan Evaluasi NSPK	73.120															
Hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha yang dipantau	693.551	laporan	1						1							
1 Penyusunan rencana pengembangan kompetensi teknis pengawas perikanan	235.059															
2 Peningkatan kompetensi teknis pengawas perikanan	458.492															

## 2.5 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulan/semester/tahun sesuai indikator kinerja. Setiap indikator kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Informasi

indikator kinerja. Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih target kinerja sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja. Informasi indikator kinerja berisi informasi sasaran strategis, definisi, formula perhitungan/pengukuran, satuan pengukuran, jenis aspek target pada SKP, validitas, unit/pihak penanggung jawab, sumber daya, status data, jenis konsolidasi data, metode cascading, klasifikasi/polarisasi dan periode pelaporan. Hal ini sebagai pedoman agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa indikator kinerja dan capaiannya.

### 1. Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan sumber daya perikanan yang efektif

Nilai pemahaman masyarakat dalam bidang pengawasan sumber daya perikanan adalah sebuah ukuran untuk menilai tingkatan kemampuan masyarakat atau stakeholder perikanan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan/atau melakukan kegiatan usaha perikanan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Responden merupakan pelaku usaha di bidang perikanan, para tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat, asosiasi di bidang perikanan serta masyarakat perikanan yang memperoleh penyadartahuan dengan metode random sampling.

Formula:

$$X_{sadar} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

$X_{sadar}$  = Nilai rata-rata pemahaman masyarakat di bidang pengawasan sumber daya perikanan

$X_i$  = Jumlah nilai kuesioner pemahaman masyarakat bidang pengawasan sumber daya perikanan

$n$  = Jumlah responden

Parameter Nilai:

Nilai Pemahaman Sangat Baik	:	>71
Nilai Pemahaman Baik	:	61 - 70

Nilai Pemahaman Cukup Baik	:	50 - 60
Nilai Pemahaman Kurang	:	< 50

## 2. Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan

Intelijen ialah kegiatan yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Data dan informasi intelijen perikanan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Pengawas Perikanan atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi.

Penyelesaian analisis data dan informasi intelijen perikanan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah diolah atau dianalisis yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh. Target 80%.

Formula:

$$X_{intl} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

### Keterangan:

- $X_{intl}$  = Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan
- $a$  = Jumlah data dan informasi intelijen perikanan yang diselesaikan analisisnya
- $b$  = Jumlah data dan informasi intelijen perikanan yang diterima/dikumpulkan.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA

Sepanjang tahun 2024, Direktorat PSDP telah berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan dengan memperoleh capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,22%. Nilai tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh sasaran. Adapun nilai setiap sasaran merupakan hasil perhitungan atas Indikator Kinerja yang menjadi parameter pencapaiannya. Rincian pencapaian setiap sasaran dijelaskan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Direktorat PSDP Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	CAPAIAN TAHUNAN	%TASE CAPAIAN
Terselenggaranya Penadartahuan Masyarakat Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang Efektif	1 Nilai Pemahaman Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan yang Bertanggung Jawab (Nilai)	74	79,47	107%
Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	2 Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	80	100	125%
Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	3 Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional (Nilai)	100	100	100%
	4 Nilai Kualitas Penyelesaian Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)	81	100	123%
	5 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan (%)	60	100	167%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	CAPAIAN TAHUNAN	%TASE CAPAIAN	
	6	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Internal Hasil Pengawasan Perikanan dan Penyediaan Substansi Teknis Dalam Sanksi Administratif (%)	80	93	116%
	7	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Nilai)	80	80,67	101%
	8	Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO) (Nilai)	75	86,09	115%
	9	Persentase Penyelesaian Bahan Rancangan NSPK bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan (%)	100	100	100%
	10	Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Nilai)	78	82	105%
	11	Inovasi yang Dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Inovasi)	1	1	100%
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP	12	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PSDP (%)	100	100	100%
	13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	75	96,16	128%
	14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PSDP (Indeks)	82	84,34	103%
	15	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PSDP (Nilai)	84	87,25	104%
	16	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat PSDP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80	100	125%
	17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	78,90	113%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	CAPAIAN TAHUNAN	%TASE CAPAIAN
	lingkup Direktorat PSDP (Nilai)			
	18 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat PSDP (%)	94	132,29	141%
	19 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	80	100	125%
	20 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	80	100	125%
	21 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PSDP (%)	99,40	99,76	100%

### 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Direktorat PSDP telah melaksanakan kegiatan pada Tahun 2024 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap Sasaran Strategis.

#### SK1 – Terselenggaranya Penyardartahuan Masyarakat Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang Efektif

Sasaran kinerja terselenggaranya penyardartahuan masyarakat bidang pengawasan sumber daya perikanan yang efektif ini mengampu 1 indikator yaitu, Nilai Pemahaman Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Pengawasan Sumber Daya Perikanan. Dalam mencapai kinerjanya, indikator ini telah mengefisiensikan anggaran sebesar 0,03% dengan hitungan sebagaimana terdapat pada Tabel 3.2. sebagai berikut:

Tabel 3.2. Hitungan Efisiensi Anggaran SK1 Direktorat PSDP Tahun 2024

No	KRO Kegiatan pada SK tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)	(6)	(7)	(8) = (6) x (5)	(9) = (8) - (7)	(10) = (9) / (6)
2353.AEF.001	Sosialisasi dan diseminasi kebijakan pengawasan perikanan	300	300	100%	371.091.000	370.983.188	371.091.000	107.812	0,03%
<b>TOTAL</b>					<b>371.091.000</b>	<b>370.983.188</b>	<b>371.091.000</b>	<b>107.812</b>	<b>0,03%</b>

## 1. Nilai Pemahaman Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan yang Bertanggung Jawab (Nilai)

Nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan adalah sebuah ukuran untuk menilai tingkatan kemampuan masyarakat atau *stakeholder* perikanan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan/atau melakukan kegiatan usaha perikanan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Daftar kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PSDP dijelaskan pada Tabel 3.3. sebagai berikut:

Tabel 3.3. Daftar Penyadartahuan Direktorat PSDP Tahun 2024

Kegiatan	Lokasi	Peserta	Jumlah Nilai Post Test
Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun 2024	Lampung	300	23840

Kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan Tahun 2024 telah mencapai target dengan memperoleh parameter nilai pemahaman sangat baik sebesar 79,47 dari target sebesar 74 dengan perhitungan sebagai berikut:

### Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab

$$X_{sadar} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

**Keterangan:**

$X_{sadar}$  : Nilai rata-rata pemahaman masyarakat di bidang pengawasan sumber daya perikanan  
 $x_i$  : Jumlah nilai kuesioner pemahaman masyarakat bidang pengawasan sumber daya perikanan  
 $n$  : Jumlah responden

$$X_{sadar} = \frac{23840}{300} = 79,47$$

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan target RENSTRA 2024 terjadi grafik penurunan nilai penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan. Pada tahun 2023 nilai pemahaman sebesar 88,53 turun sebesar 10,23% menjadi 79,47. Hal ini dikarenakan peserta kegiatan penyadartahuan di lokasi Lampung masih belum

memahami perizinan berusaha berbasis risiko. Adapun peserta kegiatan meliputi pelaku usaha bidang penangkapan ikan, pengolahan hasil perikanan, distribusi hasil perikanan dan pembudidayaan ikan yang masih belum memahami ketentuan dasar pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

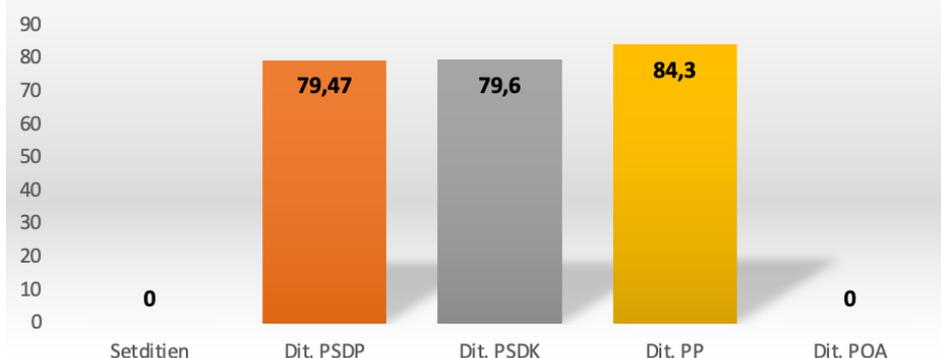
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab (nilai)	70	70	71	89	72	86,2	73	88,53	74	79,47

Kemudian, jika dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2024, Direktorat PSDP menduduki urutan ketiga, paling rendah dari Direktorat PPSDK dan Direktorat Penanganan Pelanggaran. Hal ini disebabkan masih kurangnya antusias masyarakat terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber, terlihat dari tingkat pemahaman peserta yang mengalami penurunan nilainya dari tahun sebelumnya.

Grafik 3.1. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP

### Perbandingan Nilai Pemahaman Masyarakat Lingkup Ditjen. PSDKP Tahun 2024



Kegiatan penyadartahuan yang dilakukan oleh Direktorat PSDP di tahun 2024 mengalami efisiensi anggaran. Pada tahun 2023 kegiatan penyadartahuan dilaksanakan di 4 (empat) lokasi, sedangkan pada tahun ini dilakukan di 1 (satu) lokasi. Adanya efisiensi anggaran ini tidak menghalangi keberhasilan Direktorat PSDP dalam mencapai target nilai di tahun 2024 sebesar 79,47.

Berdasarkan capaian nilai tahun 2024 Direktorat PSDP akan lebih berupaya untuk meningkatkan performa dalam pengemasan materi dan pemilihan Narasumber, agar masyarakat khususnya pelaku usaha perikanan yang menjadi peserta kegiatan dapat lebih tertarik dan memahami materi yang disampaikan oleh para Narasumber.

Direktorat PSDP terus berupaya untuk dapat melakukan kegiatan penyadartahuan yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pengawasan perikanan di tahun 2025 ke depan. Hal ini dapat membuka pengetahuan para pelaku usaha perikanan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## SK2 – Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan

Sasaran kinerja tersedianya data dan informasi intelijen perikanan ini mengampu 1 indikator yaitu, Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan. Dalam mencapai kinerjanya, indikator ini telah mengefisiensikan anggaran sebesar 3,49% dengan hitungan sebagaimana terdapat pada Tabel 3.5. sebagai berikut:

Tabel 3.5. Hitungan Efisiensi Anggaran SK2 Direktorat PSDP Tahun 2024

No	Output Kegiatan pada SK tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)	(6)	(7)	(8) = (6) x (5)	(9) = (8) - (7)	(10) = (9) / (6)
2352.BHD.001	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	2	2	100%	123.580.000	119.262.871	123.580.000	4.317.129	3,49%
<b>TOTAL</b>					<b>123.580.000</b>	<b>119.262.871</b>	<b>123.580.000</b>	<b>4.317.129</b>	<b>3,49%</b>

## 2. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)

Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan Tahun 2024 telah melebihi target yang telah ditetapkan dengan nilai perolehan yaitu 100% dari target sebesar 80%. Capaian tersebut merupakan hasil analisa data dan informasi intelijen yang dianalisa dan dilaporkan atas kegiatan intelijen yang dilakukan sepanjang tahun 2024.

Kegiatan Intelijen Perikanan Tahun 2024 telah dilakukan di 2 lokasi Kabupaten/Kota yang menjadi target dan telah dianalisis seluruhnya. Data dan informasi intelijen perikanan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Pengawas Perikanan atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Adapun penghitungannya sebagai berikut:

### Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan

$$X_{intl} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

**Keterangan:**

$X_{intl}$  : Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan  
a : Jumlah data dan informasi intelijen perikanan yang diselesaikan analisisnya  
b : Jumlah data dan informasi intelijen perikanan yang diterima/dikumpulkan

$$X_{intl} = \frac{2}{2} \times 100 = 100\%$$

Jika dibandingkan dengan target dan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen perikanan tetap berada di angka maksimal yaitu 100%. Namun, indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target RENSTRA 2024 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2023. Meskipun merupakan indikator kinerja baru namun indikator kinerja Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan Tahun 2024 ini mencapai nilai maksimal.

Berdasarkan capaian tahun 2023 dan 2024, Direktorat PSDP berusaha mempertahankan dan mengoptimalkan kinerja dalam

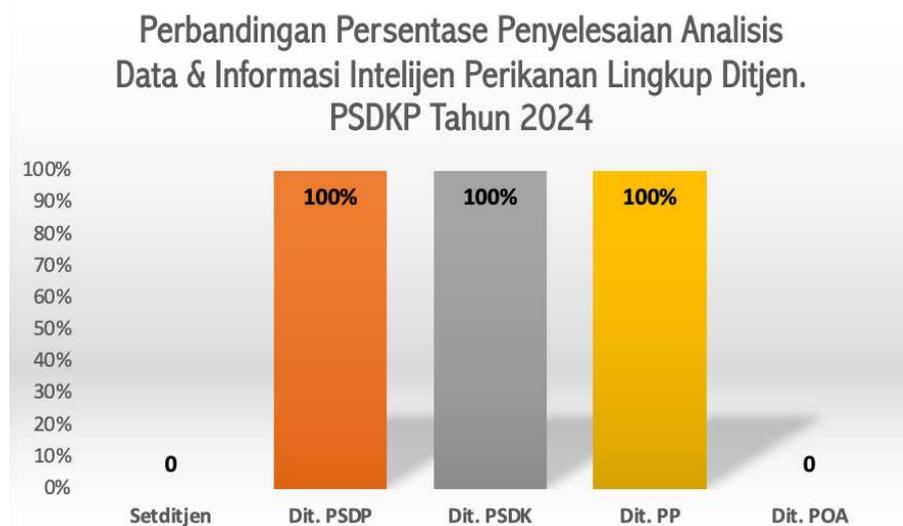
melakukan kegiatan intelijen dari pengumpulan data, analisa dan pelaporannya. Hal ini dibuktikan dengan penindakan yang berhasil menggagalkan berbagai kegiatan ilegal seperti penyelundupan BBL.

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	0	0	0	0	0	0	80	100	80	100

Demikian halnya jika dibandingkan dengan Direktorat lain, indikator persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen berkedudukan yang sama dengan Direktorat PSDK. Direktorat PSDP berusaha mempertahankan dan mengoptimalkan kinerja dalam melakukan kegiatan intelijen dari pengumpulan data, analisa dan pelaporannya. Hal ini dibuktikan dengan penindakan yang berhasil menggagalkan berbagai kegiatan ilegal seperti penyelundupan BBL.

Grafik 3.2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Keberhasilan capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan intelijen merupakan kegiatan yang penting dilaksanakan dalam rangka mendukung pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan.

Seluruh kegiatan intelijen perlu dicatat, dianalisa dan dilaporkan agar memudahkan kegiatan pengawasan pada tahun-tahun yang akan datang. Seluruh laporan (data dan informasi) ini akan menjadi referensi bagi Pengawas Perikanan dalam mendalami modus operandi pelanggaran yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Selain itu, keberhasilan capaian ini didukung oleh efisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya. Kegiatan intelijen melibatkan Pengawas Perikanan yang memahami teknis dan kondisi lapangan sehingga setiap dukungan sumber daya dapat dioptimalkan dengan baik serta prioritas pengawasan yang menjadi perhatian banyak pihak terkait maraknya dugaan aktivitas ilegal di sektor perikanan. Hal ini menjadi faktor pendukung agar kegiatan intelijen dapat dilaksanakan secara maksimal.

### **IK3 – Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan**

Sasaran kinerja terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan ini mengampu 9 indikator yaitu:

- a. Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional
- b. Nilai Kualitas Penyelesaian Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan
- d. Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan substansi teknis dalam sanksi administrasi
- e. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP
- f. Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO)
- g. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pengawasan SDP

h. Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Pengawasan Sumber Daya Perikanan

i. Inovasi yang dihasilkan Direktorat PSDP

Dalam mencapai kinerjanya, 9 indikator ini telah mengefisiensikan anggaran sebesar 6,02% dengan hitungan sebagaimana terdapat pada Tabel 3.7. sebagai berikut:

Tabel 3.7. Hitungan Efisiensi Anggaran SK3 Direktorat PSDP Tahun 2024

No	Output Kegiatan pada SK tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)	(6)	(7)	(8) = (6) x (5)	(9) = (8) - (7)	(10) = (9) / (6)
2353.AFA.001	NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	3	3	100%	674.689.000	673.460.571	674.689.000	1.228.429	6,02%
2353.BKB.001	Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan yang dipantau	12	12	100%	7.047.762.000	6.623.696.281	7.047.762.000	424.065.719	
2353.QIC.001	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	15	15	100%	677.220.000	675.587.740	677.220.000	1.632.260	
2352.AEA.001	Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	3	3	100%	2.874.298.000	1.581.188.844	2.874.298.000	1.293.109.156	
<b>TOTAL</b>					<b>11.273.969.000</b>	<b>9.553.933.436</b>	<b>11.273.969.000</b>	<b>1.720.035.564</b>	<b>6,02%</b>

### 3. Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional (Nilai)

Pemeriksaan pelaku usaha yang mendapat atensi pimpinan pada tahun 2024 salah satunya adalah kegiatan pengawasan importasi ikan, pengawasan bahan baku pakan ikan, penangkapan ikan terukur, dan pengawasan budidaya ikan sidat. Seluruh rangkaian pemeriksaan dan pengawasan telah dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dinilai berdasarkan akumulasi kriteria persiapan, pemeriksaan/pengawasan, dan pelaporan yang telah dilaksanakan. Indikator ini telah mencapai target sebesar 100% dari target tahunan yaitu 100%. Adapun penghitungannya sebagai berikut:

**Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional**

$$x_{ppsdp} = \frac{\sum_{i=1}^n (Xi + \dots + Xn)}{n}$$

**Keterangan:**

- $X_{ppsdp}$  : Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional
- $xi$  : Nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan
- $n$  : Jumlah pelaku usaha pemanfaatan SDP yang diperiksa kepatuhannya

$$x_{ppsdp} = \frac{1500}{15} = 100\%$$

Jika dibandingkan dengan target dan capaian pada tahun 2023, capaian yang diperoleh tetap maksimal dan stabil setiap tahun. Namun, Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target RENSTRA 2024 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2023. Meskipun merupakan indikator kinerja baru namun indikator kinerja Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau berdampak Nasional Tahun 2024 ini mencapai nilai maksimal.

Beberapa kegiatan pengawasan yang berdampak nasional dan merupakan atensi pimpinan adalah pengawasan impor komoditas perikanan. Hal ini menjadi atensi pimpinan dan berdampak nasional karena ketidakpatuhan pelaku usaha dalam hal peruntukannya akan merugikan masyarakat dan mempengaruhi harga komoditas tersebut di pasar lokal maupun nasional. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaku usaha dan pemanfaat tersebut harus dimaksimalkan.

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional (Nilai)	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100

Kemudian, jika dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2024, realisasi indikator ini Direktorat PSDP berkedudukan sama dengan Direktorat PSDK. Keberhasilan pengawasan ini harus terus dipertahankan dan perlu meningkatkan kapabilitas Pengawas Perikanan dalam melakukan pengawasan.

Pengawas Perikanan harus mampu beradaptasi dan terus memperlengkapi pengetahuan dan keterampilan karena sektor pengawasan yang menjadi atensi pimpinan dan berdampak nasional ini berkaitan dengan instansi pemerintah lainnya. Teknis dan mekanisme pengawasan perlu ditingkatkan mengingat ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang dinamis. Adapun penghitungannya sebagai berikut:

Grafik 3.3. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional tercapai juga didukung oleh anggaran dan sumber daya yang cukup. Kemampuan Pengawas Perikanan dalam melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan instansi terkait juga menjadi faktor berhasilnya pemeriksaan ini dilakukan dengan baik.

Keberhasilan pemeriksaan terhadap pelaku usaha ini juga mendapat dukungan dari pimpinan sehingga teknis pengawasan tidak menghadapi masalah-masalah yang mempersulit pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan.

#### **4. Nilai Kualitas Penyelesaian Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)**

Nilai Kualitas Penyelesaian Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan Tahun 2024

tercapai dengan nilai sebesar 100. Nilai tersebut melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu 81. Nilai tersebut dihitung dari nilai capaian tahapan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan meliputi nilai pengumpulan hasil pemeriksaan, pelaksanaan, dan pelaporan dibagi Jumlah hasil pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diverifikasi. Adapun penghitungannya sebagai berikut:

**Nilai Kualitas Penyelesaian Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan**

$$X_{ver} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_1 + \dots + X_n)}{n}$$

**Keterangan:**

- X<sub>VER</sub> : Nilai Kualitas penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan
- xi : Nilai capaian tahapan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan
- n : Jumlah hasil pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diverifikasi

$$X_{ver} = \frac{262300}{2623} = 100$$

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target RENSTRA 2024 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 tidak terlihat adanya kenaikan maupun penurunan capaian karena sejak tahun 2023 untuk indikator ini sudah mencapai nilai maksimal.

Kondisi ini didukung oleh penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan oleh UPT PSDKP yang juga mencapai nilai maksimal pada tahun ini sehingga memudahkan verifikator untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh hasil pengawasan yang dilaporkan.

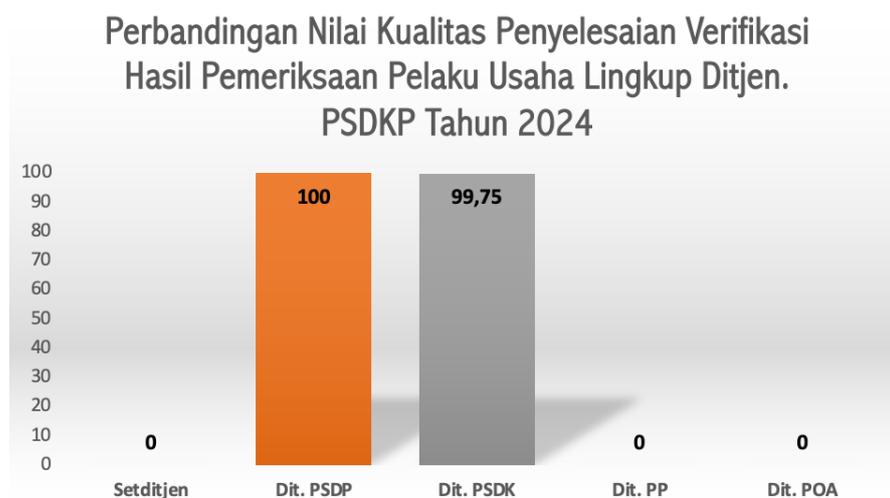
Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Nilai kualitas penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Nilai)	0	0	0	0	0	0	80	100	81	100

Kemudian, jika dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2024, realisasi indikator Direktorat PSDP ini berkedudukan sama dengan Direktorat PSDK.

Berdasarkan capaian nilai tahun 2024 Direktorat PSDP berupaya untuk mempertahankan performa pengawas perikanan dalam pelaksanaan pengawasan perikanan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan kedisiplinan dari verifikator dalam menyelesaikan verifikasi hasil pengawasan tepat waktu setiap bulan sehingga setiap kegiatan usaha yang mendapatkan rekomendasi pembinaan dan perbaikan serta sanksi dapat ditindaklanjuti sesegera mungkin.

Grafik 3.4. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Indikator kinerja ini dicapai dengan kondisi keterbatasan SDM pengawas perikanan dan verifikator yang ada di Direktorat PSDP

namun keterbatasan ini tidak mengakibatkan target kinerja ini gagal dicapai oleh Direktorat PSDP.

Keberhasilan dari pencapaian target ini tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat PSDP untuk terus memantau pelaksanaan pengawasan perikanan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan perikanan setiap triwulan dan supervisi pengawasan perikanan ke UPT Ditjen PSDKP.

## 5. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan (%)

Persentase penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan tercapai dengan nilai sebesar 100%. Data capaian dihitung berdasarkan jumlah tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang diselesaikan dibagi dengan total rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan. Berdasarkan hasil verifikasi terdapat 498 unit usaha yang mendapat rekomendasi pembinaan dan perbaikan. Dari 498 unit usaha tersebut, seluruhnya telah disampaikan kepada Eselon I teknis dan UPT Ditjen PSDKP sehingga nilai capaian sebesar 100% dari target sebesar 60%. Adapun penghitungannya sebagai berikut:

### Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan

$$X_{ppkp} = (a/b) \times 100\%$$

**Keterangan:**

- X<sub>PPKP</sub>* : Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan  
a : Jumlah rekomendasi tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang diselesaikan  
b : Total rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan

$$X_{ppkp} = \frac{498}{498} \times 100 = 100\%$$

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target RENSTRA 2024 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2023. Meskipun merupakan indikator kinerja baru, namun indikator kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan ini melebihi

target tahunan. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 capaian nilai peminaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan terjadi kenaikan dari nilai persentase 81,10% menjadi 100%.

Berdasarkan capaian tahun 2024 ini, kenaikan persentase penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan didukung oleh Pengawas Perikanan Pusat yang berdasarkan hasil verifikasi ditemukan beberapa pelaku usaha yang membutuhkan pembinaan dan perbaikan. Selain penyampaian Nota Dinas kepada Unit Kerja Pembina Teknis, Direktorat PSDP menindaklanjuti dengan penyampaian surat kepada UPT PSDKP untuk melakukan pemantauan atas perbaikan yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha dan melaporkan hasilnya kepada Direktorat PSDP.

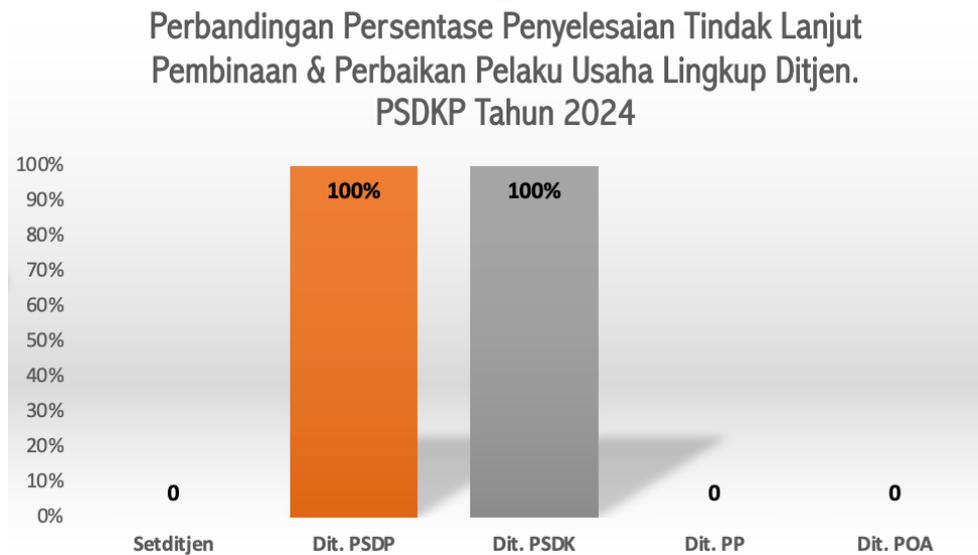
Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Persentase penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan (%)	0	0	0	0	0	0	75	81,10	60	100

Kemudian, jika dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2024, realisasi indikator ini Direktorat PSDP berkedudukan sama dengan Direktorat PPSDK.

Keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia Direktorat PSDP yang kooperatif dan kompak dalam perkembangan sistem agar berjalan lebih efektif dan efisien dalam menindaklanjuti hasil tindak lanjut pembinaan dan perbaikan, sehingga penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha dapat tersampaikan dengan baik.

Grafik 3.5. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Keberhasilan penyelesaian tindak lanjut pembinaan perbaikan pelaku usaha perikanan ini juga ditunjang dengan adanya koordinasi yang baik antara Pengawas Perikanan Pusat dan Pengawas Perikanan UPT Ditjen PSDKP melalui monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan perikanan setiap triwulan dan semester serta melakukan supervisi pengawasan perikanan ke UPT PSDKP.

#### **6. Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan substansi teknis dalam sanksi administrasi (%)**

Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan substansi teknis dalam sanksi administrasi perikanan tahun 2024 telah mencapai target yaitu 93% dari target 75%. Penanganan hasil pengawasan telah ditindaklanjuti mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Setiap hasil pemeriksaan/pengawasan yang mendapat rekomendasi sanksi khususnya yang terkait dengan pengenaan denda telah ditindaklanjuti dengan ekspose internal hingga proses rekomendasi kepada Direktorat Penanganan Pelanggaran. Adapun penghitungannya sebagai berikut:

**Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan subtansi teknis dalam sanksi administrasi perikanan**

$$X_{ekspint} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

**Keterangan:**

- X<sub>ekspint</sub> : Persentase tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan subtansi teknis dalam sanksi administrasi perikanan lingkup Direktorat PPSDP  
xi : Jumlah ekspose internal lingkup Direktorat PPSDP yang diselesaikan  
n : Jumlah usulan ekspose internal yang disampaikan ke Dit. PPSDP

$$X_{ekspint} = \frac{139}{149} \times 100 = \mathbf{93\%}$$

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target RENSTRA 2024 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2023. Indikator ini hanya dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terlihat adanya penurunan capaian karena terdapat hasil pengawasan yang mendapatkan rekomendasi sanksi namun belum dilakukan ekspose internal pada tahun 2024.

Kendala ini muncul diakibatkan oleh belum selesainya proses perizinan PKKPRL yang menjadi salah satu pelanggaran yang ditemukan. PKKPRL ini menjadi salah satu persyaratan bagi perusahaan untuk menindaklanjuti pelanggaran berikutnya.

Dengan pertimbangan setiap sanksi administratif memiliki jangka waktu penyelesaian dan telah adanya iktikad baik dari perusahaan untuk melakukan perbaikan atas pelanggaran perizinan dasarnya maka untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha ini akan dilakukan setelah PKKPRL terpenuhi.

Untuk menindaklanjuti masalah ini diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Direktorat PSDK sebagai institusi yang menangani pelanggaran PKKPRL dan Pengawas Perikanan di UPT PSDKP. Koordinasi selama ini melalui telepon dan langsung kepada Direktorat PSDK karena lokasi berdekatan.

Selain itu, didukung juga oleh SDM Pusat dan UPT PSDKP yang telah melaksanakan pemeriksaan/pengawasan dan penanganan hasil pengawasan kegiatan usaha perikanan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Setiap unit kerja telah melaksanakan prosedur pengawasan, mengawal proses penanganan hasil pemeriksaan hingga

penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas pengenaan sanksi yang telah ditetapkan.

Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan substansi teknis dalam sanksi administrasi perikanan (%)	0	0	0	0	0	0	75	100	75	93

Jika dibandingkan dengan Eselon II Lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2024, realisasi Direktorat PSDP lebih rendah dibandingkan dengan Direktorat PSDK.

Grafik 3.6. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Indikator ini akan berhasil apabila ditunjang oleh proses pelaporan hasil pengawasan dari UPT Ditjen PSDKP yang tepat waktu sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh Direktorat PSDP. Melihat hasil capaian di tahun 2024, beberapa hal yang menjadi rekomendasi adalah koordinasi yang berkesinambungan antara

UPT PSDKP yang melaksanakan pemeriksaan/pengawasan dengan Pusat yang menangani hasil pengawasan dan tindak lanjutnya. Hasil pemeriksaan/pengawasan di lapangan khususnya terkait pengenaan sanksi dapat secara simultan ditangani oleh pihak-pihak terkait.

## **7. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP (Nilai)**

Pembinaan dan pengembangan pengawasan Perikanan merupakan usaha/tindakan/ kegiatan yang berdayaguna bagi penguatan fungsi dan pelaksanaan pengawasan perikanan sesuai kewenangannya. Kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan perikanan dinilai dari setiap tahapan berupa (a)persiapan, (b)pelaksanaan, dan (c)pelaporan di setiap aktivitas yaitu (1)penyusunan rekomendasi, (2)pembinaan kepada Pemerintah daerah, (3)pembinaan kepada UPT Ditjen PSDKP, dan (4)pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan kerjasama pengawasan perikanan. Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan Tahun 2024 adalah 80,67. Nilai kinerja tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 80, sehingga persentase realisasi capaian sebesar 100,84%. Adapun penghitungannya nilai capaian tersebut adalah sebagai berikut:

## Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP

Formula perhitungan :  $X_{binbang} = (0,4 * X_a) + (0,25 * X_b) + (0,2 * X_c) + (0,15 * X_d)$

Keterangan:

$X_{binbang}$	:	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan
$X_a$	:	Nilai Tahapan Kualitas Penyusunan Rekomendasi Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan
$X_b$	:	Nilai Tahapan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan di Pemerintah Daerah
$X_c$	:	Nilai Tahapan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan di UPT Ditjen PSDKP
$X_d$	:	Nilai Tahapan Kualitas Pelaksanaan Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan

### Hasil Akhir Penghitungan

$$X_{binbang} = (0,4 * X_a) + (0,25 * X_b) + (0,2 * X_c) + (0,15 * X_d)$$

$$X_{binbang} = (0,4 * 84,56) + (0,25 * 82,37) + (0,2 * 61,50) + (0,15 * 93,00)$$

$$X_{binbang} = (33,8) + (20,59) + (12,30) + (13,95)$$

$$X_{binbang} = \mathbf{80,67}$$

Indikator nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan tidak dapat dibandingkan dengan target RENSTRA 2024 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2023. Direktorat PSDP memperoleh nilai sebesar 80,63 dari target sebesar 80 di tahun 2023. Jika dibandingkan realisasi tersebut dengan capaian di tahun 2024, maka nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan telah meningkat sebesar 0,04.

Tercapainya nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan SDP pada tahun 2024 ditunjang oleh adanya kolaborasi dari keaktifan Direktorat PSDP, UPT PSDKP, Pemerintah daerah dan organisasi/lembaga yang bergerak di bidang perikanan. Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan pembinaan terhadap 27 Pemerintah daerah (18 Pemerintah Provinsi dan 9 Pemerintah Kab/Kota) dan 9 UPT Ditjen PSDKP. Selain itu juga telah dilakukan pengembangan pengawasan perikanan melalui 20 aktivitas fasilitasi koordinasi dan kerjasama

pengawasan perikanan dengan organisasi/lembaga/pemerintah daerah. Setiap aktivitas pembinaan dan pengembangan diusahakan untuk memenuhi setiap tahapan yang ada, meliputi profiling atau identifikasi (persiapan), berita acara supervisi/pendampingan/pengembangan (pelaksanaan), dan laporan hasil pembinaan dan pengembangan (pelaporan).

Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP (Nilai)	0	0	0	0	0	0	80	80,63	80	80,67

Indikator kinerja nilai kualitas pembinaan dan pengembangan juga dimiliki oleh unit kerja eselon 2 lain, yaitu Direktorat PSDK. Direktorat PSDK memiliki nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya kelautan sebesar 100 di tahun 2024. Jika dilihat secara nilai capaian, Direktorat PSDP memiliki nilai lebih rendah dari Direktorat PSDK sebesar 19,33. Namun jika dilihat secara metode pengukuran, terdapat perbedaan cara penghitungan dan jumlah aktivitas pembinaan dan pengembangan. Direktorat PSDK hanya melakukan pembinaan kepada Pemerintah daerah (provinsi) dan pembinaan kepada UPT Ditjen PSDKP. Sehingga nilai capaian kedua direktorat tidak dapat dibandingkan.

Namun jika dilihat secara metode pengukuran, capaian kedua direktorat tidak bisa dibandingkan. Hal tersebut terjadi karena terdapat perbedaan cara penghitungan dan jumlah aktivitas pembinaan dan pengembangan. Direktorat PSDK hanya melakukan pembinaan kepada Pemerintah daerah dan pembinaan kepada UPT Ditjen PSDKP. Selanjutnya Direktorat PSDK melakukan pembinaan

kepada pemerintah daerah dilakukan sebanyak 13 pemerintah provinsi.

Grafik 3.7. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Berdasarkan capaian Tahun 2024 ini, Direktorat PSDP berupaya untuk mengoptimalkan faktor pendukung atas keberhasilan pembinaan dan pengembangan SDP baik di UPT maupun Pemda serta kerjasama dengan organisasi atau lembaga yang bergerak dibidang perikanan. Faktor pendukung tersebut antara lain kapasitas/kemampuan SDM pengawas perikanan, fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pengawasan, monitoring dan evaluasi secara berkala, serta pembangunan hubungan kerjasama dengan organisasi/lembaga eksternal. Selain itu dengan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan berdasarkan tahapan - tahapan yang ditetapkan.

#### **8. Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO) (Nilai)**

Sistem pengawasan kapal perikanan merupakan sistem informasi pengawasan dan pemeriksaan kapal perikanan pada saat keberangkatan dan kedatangan guna mendukung pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur dan/atau optimalisasi PNBK Perikanan Pasca Produksi. Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal

Perikanan (eSLO) Tahun 2024, telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan nilai perolehan yaitu 86,09 dari target tahunan sebesar 80 yang diperoleh dari survey kepuasan Pengawas Perikanan (*sampling*) sebanyak 195 responden sebagai pengguna sistem yang mengukur terhadap *performance, information, efficiency, and service* sistem pengawasan kapal perikanan yang diukur menggunakan skala likert. Adapun penghitungannya sebagai berikut:

### Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO)

$$X_{eslo} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

$X_{eslo}$  : Nilai keandalan sistem pengawasan kapal perikanan

$X_i$  : nilai kuesioner pengguna sistem pengawasan kapal perikanan

$n$  : Jumlah responden

$$X_{eslo} = \frac{16788}{195} = 86,09$$

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target RENSTRA 2024 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2023. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian indikator kinerja Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO) menurun dari 86,45 menjadi 86,09 akan tetapi nilai tersebut masih melebihi target tahunan sebesar 80.

Penurunan capaian indikator kinerja Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO) terjadi karena adanya penyesuaian pada sistem aplikasi e-SLO pasca terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan.

Sistem Pengawasan Kapal Perikanan ini digunakan oleh banyak pihak (KKP dan Pelaku Usaha) sehingga memerlukan koordinasi yang baik agar penggunaan sistem dapat berjalan lancar. SDM yang kooperatif dan kompak dalam perkembangan sistem dapat membuat sistem berjalan lebih efektif dan efisien.

Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO) (Nilai)	0	0	0	0	0	0	75	86,45	80	86,09

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja Eselon II lingkup Ditjen PSDKP karena tidak terdapat pada unit kerja Eselon II lain.

Grafik 3.8. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Berdasarkan capaian tahun 2024, selain koordinasi juga diperlukan sosialisasi penggunaan sistem apabila terdapat penyempurnaan/penyesuaian sistem, hal ini dilakukan agar sistem lebih optimal untuk memudahkan pekerjaan yang selanjutnya sebagai bahan pimpinan untuk penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/penindakan yang akan ditempuh.

## 9. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pengawasan SDP (Nilai)

Nilai penyelesaian rancangan NSPK Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan selama tahun 2024 telah mencapai target yaitu sebesar 100% dari target sebesar 100%. NSPK yang sudah selesai perancangannya yaitu *draft* Perdirjen PSDKP Nomor 12

Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan, *draft* Perdirjen 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan Penangkapan, Pembudidayaan, dan Distribusi Lobster (*panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), dan *draft* revisi Permen KP Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan. Perhitungan berdasarkan pembobotan dari:

- Telah dilaksanakannya rapat pembahasan rancangan dengan unit kerja terkait;
- telah dilakukan uji publik NPSK dengan Komandan UPT PSDKP dan Bagian Hukum Setditjen PSDKP; dan
- Draft/rancangan NSPK telah disampaikan via memo kepada setditjen PSDKP

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024, indikator Nilai penyelesaian rancangan NSPK Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan capaiannya relatif stabil. Direktorat PSDP setiap tahun telah menyelesaikan tugasnya dalam menyusun rancangan NSPK bidang pengawasan sumber daya perikanan. Penyusunan NSPK ini tentu saja dipengaruhi oleh perubahan kebijakan dan hasil pulbaket permasalahan di lapangan sehingga mendorong percepatan penyelesaian NSPK.

Keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh SDM Direktorat PSDP dalam melakukan identifikasi substansi dan pemilihan narasumber, sehingga diperoleh draft NSPK final dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan tersampaikan dengan baik.

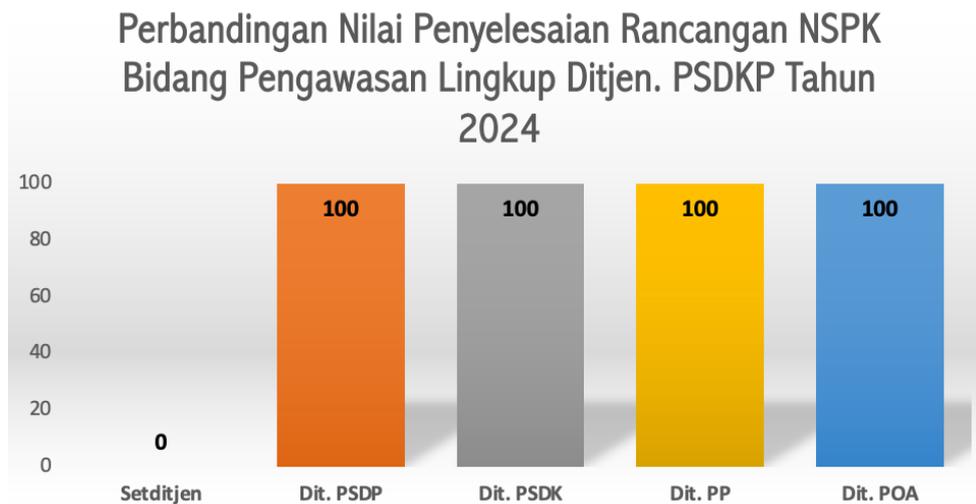
Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pengawasan SDP (Nilai)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Apabila dibandingkan dengan Eselon II Lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2024 rancangan NSPK lingkup Ditjen PSDKP telah diselesaikan secara keseluruhan, Direktorat PSDP memiliki target dan realisasi yang sama dengan Direktorat Lingkup Ditjen PSDKP.

Hal ini dilakukan karena mendukung pelaksanaan kebijakan Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan perlu menyusun rancangan NSPK sebagai dasar dan acuan pengawas perikanan dalam melaksanakan pengawasan di lapangan.

Grafik 3.9. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Berdasarkan capaian nilai tahun 2024 Direktorat PSDP berupaya untuk mencermati dinamika peraturan perundangan dalam mempertahankan performa pengawas perikanan sehingga pengawas perikanan mampu menyamakan persepsi dan tindakan dilapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk menjaga kepatuhan pelaku usaha.

## 10. Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Nilai)

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan 2 (dua) kali kegiatan Bimtek oleh Direktorat PSDP, yaitu:

Tabel 3.15 Daftar Penyadartahuan Direktorat PSDP Tahun 2023

Kegiatan	Lokasi	Waktu	Jumlah Peserta	Rata-Rata Nilai Post Test
Bimbingan Teknis Pencacahan BBL Tahun 2024	Bogor, Jawa Barat	27 – 30 Agustus 2024	45 Orang	79
Peingkatan Kompetensi Pengawas Perikanan melalui Implementasi Modul Pengawasan Berbasis Risiko	Tegal, Jawa Tengah	17 – 20 September 2024	56 Orang	81
Bimbingan Teknis HACCP	Bogor, Jawa Barat	24 – 28 Juni 2024	20 orang	86

Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PSDP telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan perolehan nilai 82 dari target tahunan sebesar 78. Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PSDP diperoleh dari rata-rata tingkat pemahaman peserta Bimtek yang dilaksanakan pada lingkup Direktorat PSDP. Adapun penghitungannya sebagai berikut:

**Tingkat pemahaman peserta bimtek lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan**

$$X_{bimtek} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_1 + \dots + X_n)}{n}$$

- $X_{bimtek}$  : Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PSDP
- $x_i$  : Tingkat pemahaman peserta suatu pelatihan/Bimtek
- $n$  : Jumlah Pelatihan/Bimtek lingkup Direktorat PSDP

$$X_{bimtek} = \frac{246}{3} = 82$$

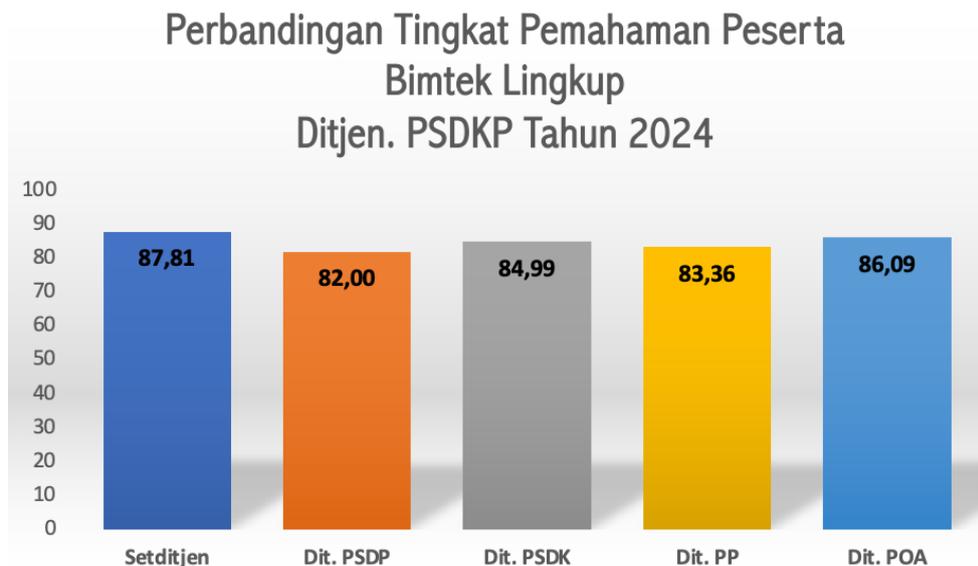
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024, terjadi penurunan grafik pada nilai pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PSDP. Hal ini disebabkan oleh materi Bimtek merupakan hal baru yang diterima Peserta Bimtek pada kesempatan pertama, sehingga memerlukan waktu dan praktik secara intens untuk dapat lebih menguasai materi. Selain itu latar belakang pendidikan peserta kegiatan Bimtek yang sangat beragam dan tidak linier dengan materi Bimtek menyebabkan nilai pemahaman peserta menjadi turun.

Tabel 3.16. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Tingkat pemahaman peserta Bimtek (Nilai)	75	75	75	83	75	87,3	77	89	78	82

Kemudian, jika dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2024, Direktorat PSDP menduduki urutan paling rendah dari Setditjen PSDKP, Direktorat PSDK, Direktorat Penanganan Pelanggaran dan Direktorat POA.

Grafik 3.10. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Sumber daya manusia pada Direktorat PSDP sangat berpengaruh terhadap persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bimtek, yaitu dalam mengemas materi dan pemilihan narasumber, sehingga maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut dapat tersampaikan dengan baik.

Direktorat PSDP terus berupaya untuk dapat melakukan kegiatan Bimtek/ToT yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pengawasan perikanan di tahun 2025 ke depan. Hal ini dapat membuka pengetahuan para pelaku usaha perikanan untuk dapat

melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 11. Inovasi yang dihasilkan Direktorat PSDP (Inovasi)

Direktorat PSDP telah menghasilkan 1 (satu) inovasi pada tahun 2024 dengan target sebesar 1 (satu) inovasi dengan judul "Awat Risiko Perikanan (AWAS RISKI)".

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024, Direktorat PSDP senantiasa berkomitmen berinovasi dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*. Meskipun pada tahun 2024 Direktorat PSDP masih belum mendapatkan peringkat kembali.

Dalam pelaksanaan menghasilkan inovasi tersebut, juga sudah dilakukan beberapa hal, di antaranya adalah tim yang terlibat dalam penyusunan dan pengembangan aplikasi tersebut dilakukan *assessment skill* yang bertujuan untuk melihat apakah dalam prosesnya setiap tim mengalami perubahan *skill*.

Assessment skill yang diuji yaitu kemampuan pemahaman konsep GKM, kemampuan analisis, kemampuan keahlian komunikasi, olah data dan menulis. Hasilnya yaitu setiap anggota tim mengalami peningkatan yang signifikan dari beberapa aspek yang dinilai tersebut. Adanya nilai assessment skill yang mengalami peningkatan, mendorong Direktorat PSDP untuk dapat terus menghasilkan inovasi setiap tahunnya.

Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP, Direktorat PSDP memiliki posisi yang sama dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP karena semua unit kerja menghasilkan 1

(satu) inovasi di tahun 2024. Inovasi yang dihasilkan oleh Direktorat PSDP dapat dilaksanakan melalui efisiensi anggaran dan SDM . Tim dapat berkomitmen dalam menghasilkan inovasi dengan keterbatasan anggaran dan SDM namun dapat memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan perikanan.

Grafik 3.11. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Melihat proses pada tahun 2024, Direktorat PSDP terus berupaya untuk dapat menghasilkan inovasi. Hal ini dapat membantu pelaksanaan kegiatan pengawasan perikanan yang lebih baik lagi ke depannya.

### **IK3 – Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP**

Sasaran kinerja tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP ini mengampu 10 indikator yaitu:

- a. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PSDP
- b. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat PSDP
- c. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PSDP
- d. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PSDP
- e. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

- f. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja
- g. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PSDP
- h. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PSDP
- i. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup Direktorat PSDP
- j. Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat PSDP

Dalam mencapai kinerjanya, 10 indikator ini telah mengefisienkan anggaran sebesar 0,06% dengan hitungan sebagaimana terdapat pada Tabel 3.18. sebagai berikut:

Tabel 3.18. Hitungan Efisiensi Anggaran SK4 Direktorat PSDP Tahun 2024

No	Output Kegiatan pada SK tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)	(6)	(7)	(8) = (6) x (5)	(9) = (8) - (7)	(10) = (9) / (6)
2355.EBA.962.051.E	Layanan Umum Rumah Tangga Direktorat PSDP	1	1	100%	309.259.000	309.256.062	309.259.000	2.938	0,06%
2355.EBA.994.002.C	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PSDP	1	1	100%	1.311.565.000	1.310.632.733	1.311.565.000	932.267	
<b>TOTAL</b>					<b>1.620.824.000</b>	<b>1.619.888.795</b>	<b>1.620.824.000</b>	<b>935.205</b>	<b>0,06%</b>

## 12. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PSDP (%)

Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PSDP dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Pada tahun 2024, Direktorat PSDP telah memperoleh capaian sebesar 100% dari target tahunan sebesar 100%.

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target RENSTRA 2024 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2023. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian indikator kinerja persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup

Direktorat PSDP menurun dari 110% menjadi 100% akan tetapi nilai tersebut telah mencapai target tahunan sebesar 100%.

Kendala yang dihadapi dalam pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Direktorat PSDP adalah perubahan jadwal kegiatan. Perubahan tersebut secara otomatis mengubah jadwal kegiatan pengendalian.

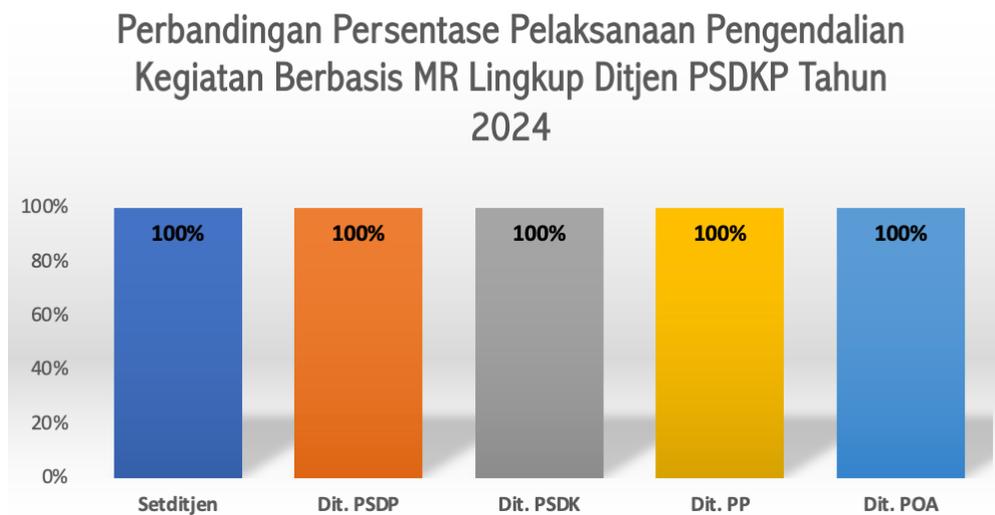
Perubahan jadwal kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana yang berakibat pada perubahan jadwal pengendalian ditindaklanjuti dengan melakukan adendum pengendalian risiko. Adendum tersebut diajukan dan ditandatangani oleh Direktur PSDP dan disampaikan kepada Sekretaris Ditjen PSDKP.

Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko (%)	0	0	0	0	0	0	100	110	100	100

Apabila dibandingkan dengan Eselon II lainnya, seluruhnya memiliki kedudukan yang sama. Keberhasilan ini juga didukung efisiensi SDM Tim Manajemen Risiko yang andal sehingga Pemantauan Manajemen Risiko terdokumentasikan dengan baik. Selain itu, operator Manajemen Risiko juga melakukan koordinasi atau rapat secara berkala kepada Tim Manajemen Risiko dengan Setditjen PSDKP. Ketepatan dalam memetakan risiko dan melakukan pengendaliannya menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis risiko.

Grafik 3.12. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Direktorat PSDP berkomitmen untuk terus mencapai target Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PSDP sehingga kedepannya target yang diproyeksikan optimis dapat dicapai.

### **13. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat PSDP (Nilai)**

Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

Nilai pengawasan kearsipan lingkup Ditjen PSDKP diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ.

Nilai pengawasan kearsipan lingkup Direktorat PSDP tahun 2024 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan nilai capaian sebesar 96,16 dari target tahunan sebesar 75%.

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Tahun 2024. Keberhasilan

capaian kinerja pada indikator ini salah satunya didukung penuh dari seluruh pegawai Direktorat PSDP yang senantiasa menerapkan Tata Naskah Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 3.20. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Nilai Pengawasan Arsip Internal lingkup PSDKP (nilai)	0	0	0	0	0	0	0	0	75	96,16

Jika dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2024, Direktorat PSDP menduduki urutan ke – 3 setelah Sekretariat Ditjen PSDKP dan Direktorat PSDK. Efisiensi sumber daya manusia terdapat dalam indikator ini, karena jika dibandingkan dengan peta jabatan Arsiparis yang tersedia masih mengalami kekurangan. Meski demikian, Direktorat PSDP senantiasa mendukung sumber daya manusianya dengan cara mengikutsertakan Bimbingan Teknis dan Pelatihan terhadap Arsiparis dimaksud. Adapun Bimbingan Teknis dan Pelatihan yang telah diikuti, yaitu:

- a. Koordinasi Penyelamatan Arsip Penanganan Covid-19 Pasca Penetapan Berakhirnya Status Pandemi dan Sosialisasi Surat Edaran Kepala ANRI tentang Penyelamatan Arsip Kemaritiman yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
- b. Webinar Nasional Kearsipan Perkembangan Kearsipan di Indonesia dari Masa ke Masa yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan.
- c. Bimbingan Teknis Kearsipan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan oleh Biro Umum dan PBJ

- d. Telah lulus dalam Pelatihan Fungsional Arsiparis Keterampilan Angkatan VI Tahun 2024 dengan predikat Sangat Memuaskan yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Grafik 3.13. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Dalam mempertahankan nilai pengawasan kearsipan, Direktorat PSDP akan kembali melakukan sosialisasi dan memonitoring terkait penerapan Tata Naskah Dinas yang berlaku guna menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

#### 14. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PSDP (Indeks)

Pencapaian sasaran ini diidentifikasi ke dalam 1 indikator kinerja yaitu indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat PSDP. Indikator Kinerja tersebut mengukur Profesionalitas ASN berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Pada tahun 2024, IKU tersebut sudah dilakukan analisa. Direktorat PSDP telah mencapai target dengan memperoleh nilai sebesar 84,34 dari target 84 dan masuk ke dalam kategori Tinggi. Nilai

tersebut diambil pada laman [www.ropeg.kkp.go.id](http://www.ropeg.kkp.go.id) per 9 Januari 2025.

IP ASN 2024												
Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2023												
Silakan ketik Nama Unit		Cari										
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
16	STASIUN PSDKP BIAK	41	20.93	83.72 %	35.99	89.98 %	25	83.33 %	5	100 %	86.92	TINGGI
17	DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN	36	22.03	88.12 %	30.34	75.85 %	26.11	87.03 %	5	100 %	83.48	TINGGI
18	DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN	38	22.31	89.24 %	30.11	75.28 %	26.92	89.73 %	5	100 %	84.34	TINGGI
19	DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN	31	21.9	87.6 %	38.92	97.3 %	25.48	84.93 %	5	100 %	91.31	SANGAT TINGGI

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024, terjadi kenaikan grafik pada indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat PSDP. Kenaikan capaian ini memperlihatkan bahwa semakin banyak ASN lingkup Direktorat PSDP yang mengikuti kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dan didukung dengan kesadaran semua pihak dalam upaya peningkatan kapasitas ASN.

Tabel 3.21. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Indeks profesionalitas ASN lingkup (Indeks)	72	70	73	80	77	82,2	78	84	82	84,34

Apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP, Direktorat PSDP menempati urutan ke-4 setelah Direktorat POA, Direktorat PP, dan Sekretariat PSDKP.

Grafik 3.14. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Melihat kenaikan capaian dari tahun ke tahun yang relatif meningkat, Direktorat PSDP berkomitmen untuk terus meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan jabatan yang diampunya.

#### 15. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PSDP (Nilai)

Penilaian mandiri SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Hasil penilaian oleh Inspektorat KKP berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB. Sepanjang tahun 2024, Direktorat PSDP telah mencapai target dengan memperoleh capaian sebesar 87,25 dari target tahunan sebesar 84.

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target RENSTRA 2024 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2023. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2023, indikator ini mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh komitmennya Direktorat PSDP dalam pengadministrasian kegiatan dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Selain itu, keberhasilan ini

juga dipengaruhi oleh SDM Perencanaan dan Pelaporan telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Kinerja setiap tahunnya yang diselenggarakan oleh Setditjen PSDKP. Sehingga, administrasi pengelolaan kinerja dapat terdokumentasikan dengan baik.

Tabel 3.22. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Penilaian Mandiri SAKIP (Nilai)	0	0	0	0	0	0	80,50	83	84	87,25

Apabila dibandingkan dengan unit kerja Eselon II Ditjen PSDKP, Direktorat PSDP menempati urutan ke-2 diungguli oleh Direktorat PP.

Grafik 3.15. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP

### Perbandingan Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2024



Upaya perbaikan untuk periode selanjutnya, perlu adanya perbaikan implementasi akuntabilitas kinerja lingkup Direktorat PSDP di antaranya:

- Memastikan adanya kesesuaian substansi antar dokumen kinerja termasuk nomenklatur indikator kinerja;
- Mendokumentasikan laporan hasil kegiatan secara berkala;
- Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

**16. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)**

Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d 30 September 2024 (Triwulan IV 2023 s.d. Triwulan III 2024) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon II pusat dan unit pelaksana teknis sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024.

Sepanjang tahun 2024, Direktorat PSDP mendapatkan 6 rekomendasi yang kemudian seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan melengkapi dan menyampaikan kepada Inspektorat KKP, sehingga capaiannya sebesar 100% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 80%.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024, terjadi kenaikan grafik pada persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan. Namun, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022, hal ini bukan menjadi penurunan capaian kinerja karena sepanjang tahun 2023, Direktorat PSDP telah melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

Tabel 3.23. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	82	76	65	100	70	100	75	75	80	100

Indikator kinerja ini diampu oleh 5 unit kerja, pada tahun 2024, capaian kinerja seluruh Eselon II Ditjen PSDKP berkedudukan sama karena telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi dengan capaian sebesar 100%.

Grafik 3.16. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Upaya perbaikan untuk periode selanjutnya, Direktorat PSDP senantiasa melaksanakan fungsinya dengan baik agar tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

## 17. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)

Nilai implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PSDP tahun 2024 telah mencapai target dengan memperoleh total nilai 78,90 dengan target 70. Hal ini bersumber dari lembar kerja yang dinilai secara mandiri oleh masing-masing unit kerja dan didukung penuh oleh pegawai Direktorat PSDP dalam menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Direktorat PSDP.

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024 karena memiliki nilai target yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh perubahan Lembar Kerja Evaluasi dan pembobotan pada tahun 2024.

Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Nilai implementasi program budaya kerja (Nilai)	0	0	0	0	21	27,7	21	25,7	70	78,9

Apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP, Direktorat PSDP mendapatkan kedudukan ke-2 setelah Direktorat POA, lebih unggul dari Setditjen PSDKP, Direktorat PSDK dan Direktorat PP.

Grafik 3.17. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP

Perbandingan Nilai Implementasi Program Budaya Kerja  
Lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2024



Keberhasilan ini didukung oleh keaktifan seluruh pegawai dalam mendukung program budaya kerja dan kelengkapan dokumen yang disiapkan. Selain itu, Direktur PSDP dalam upaya untuk mempertahankan kinerja program budaya kerja di tahun-tahun berikutnya dengan mendorong pegawai dalam berinovasi baik inovasi organisasi maupun inovasi perseorangan (sumbang saran) dan mendokumentasikan data dan dokumen pendukung setiap unsur program budaya kerja.

**18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PSDP (%)**

Sepanjang tahun 2024 capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PSDP sebesar 132,29%. Capaian kinerja lingkup Direktorat PSDP telah tercapai melebihi target yang ditetapkan sebesar 94%.

Capaian kinerja tidak lepas dari partisipasi aktif Direktur PSDP dan Ketua Tim Kerja lingkup Direktorat PSDP. Pencapaian sasaran ini diidentifikasi ke dalam suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024, terjadi kenaikan grafik secara berkala pada persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PSDP.

Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	76	84	98	86	96,76	92	113	94	132,3

Apabila dibandingkan dengan unit Eselon II Ditjen PSDKP, Direktorat PSDP menempati urutan ke-2 setelah Direktorat POA.

Grafik 3.18. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Penunjang keberhasilan yang akan dilakukan dalam mempertahankan dan meningkatkan nilai manajemen pengetahuan, Direktorat PSDP akan memantau yang belum memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal.

Direktorat PSDP dalam mengunggah agenda pada tiap bulannya ke dalam aplikasi Portal mengalami peningkatan. Hal ini didukung dengan komitmen Direktorat PSDP untuk meningkatkan keaktifan pegawai dalam menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup Direktorat PSDP.

### **19. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PSDP (%)**

Selama tahun 2024 kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PSDP telah melebihi target dengan capaian sebesar 100% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 80%. Perhitungan ini didasari dari tersedianya semua dokumen pendukung BMN yang terdiri dari beberapa komponen dan sub komponen yang memiliki bobot masing-masing.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024, Direktorat PSDP relatif stabil. Hal ini di dipengaruhi oleh komitmen Direktorat PSDP untuk mempertahankan pengelolaan BMN yang baik dan mendokumentasikan dokumen pengelolaan BMN dengan baik. Selain itu, keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh komitmen

Direktorat PSDP dalam mengelola BMN dengan baik sehingga pengelolaan dan pemanfaatan BMN berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku serta operator pengelola BMN juga melakukan koordinasi secara berkala kepada Tim Pengelola BMN di Setditjen PSDKP.

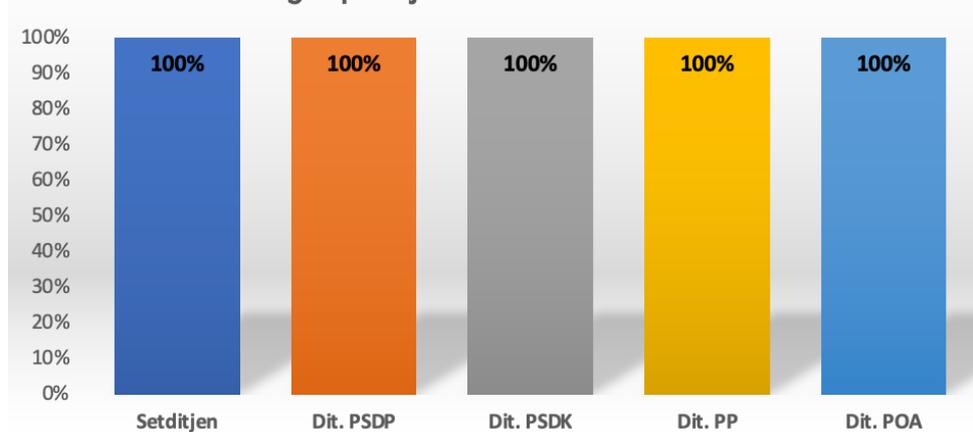
Tabel 3.26. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN (%)	0	0	100	100	100	100	77,5	100	80	100

Jika dibandingkan dengan unit kerja Eselon II Ditjen PSDKP, kelima unit kerja memiliki kedudukan yang sama dengan nilai 100%.

Grafik 3.19. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP

### Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2024



Keberhasilan pengelolaan BMN ini ditunjang dengan keaktifan Operator BMN dalam mengikuti Bimtek BMN dan mempelajari peraturan dan aplikasi BMN yang terus berkembang mengikuti kebutuhan organisasi.

## 20. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup Direktorat PSDP (%)

Pada tahun 2024 tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup Direktorat PSDP sebesar 100% melebihi dari target sebesar 80%, nilai tersebut didapatkan dengan memenuhi beberapa indikator antara lain telah menyusun manajemen risiko PBJ strategis, perencanaan dan persiapan pengadaan, pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan melalui SPSE, kesesuaian tahap pelaksanaan, laporan penyelenggaraan PBJ, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa Tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024, tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PSDP meningkat dari 88,75% menjadi 100% dan nilai tersebut masih melebihi dari target tahunan sebesar 77%.

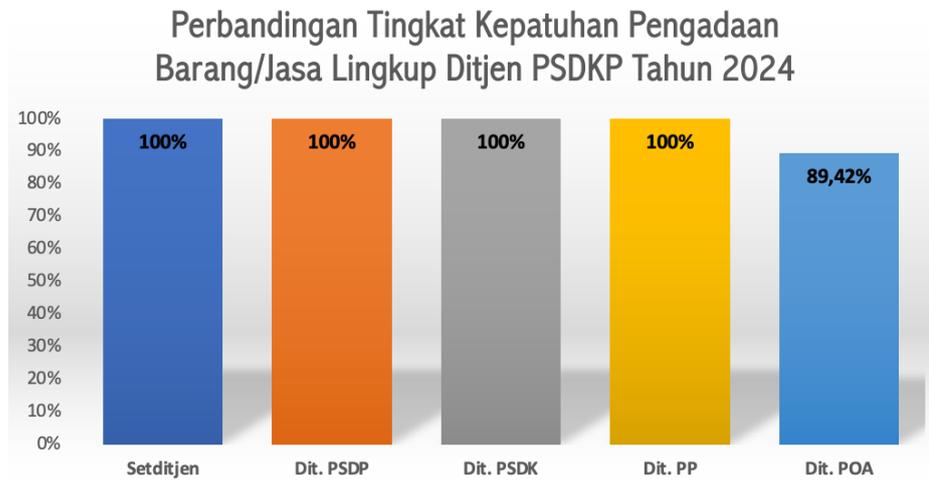
Hal ini dipengaruhi oleh komitmen Direktorat PSDP dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa yang baik. Selain itu, keberhasilan ini juga didukung oleh kinerja PPK, Tim Pendukung PPK dan Pejabat Pengadaan yang baik dalam melakukan koordinasi terkait pengadaan sesuai dengan peran dan fungsi masing masing, sesuai dengan jadwal yang telah diumumkan dalam sistem RUP sehingga pengadaan barang/jasa terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa (%)	0	0	100	100	100	100	77,5	88,75	80	100

Apabila dibandingkan dengan unit kerja Eselon II Ditjen PSDKP, Direktorat PSDP, Direktorat PSDK, Direktorat PP, dan Setditjen PSDKP menduduki posisi yang sama yaitu senilai 100%. Sedangkan Direktorat POA berada di urutan ke-5.

Grafik 3.20. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Berdasarkan capaian tahun 2024 Direktorat PSDP berupaya untuk mempertahankan tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang telah dilaksanakan, dan tetap mempertahankan kesesuaian antara waktu pengadaan dengan perencanaan.

Program yang menunjang keberhasilan indikator ini salah satunya yaitu program FGD dari Sekretariat Jenderal yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat, hal ini dapat membantu dalam menunjang keberhasilan kinerja kepatuhan Pengadaan barang/jasa ini.

## 21. Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat PSDP (%)

Realisasi anggaran Direktorat PSDP tahun 2024 telah mencapai target dengan memperoleh total nilai sebesar 99,76% dari target yang telah ditetapkan sebesar 99,4%.

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Tahun 2024. Keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini salah satunya disebabkan oleh kinerja dan sinergi yang baik dari tim keuangan Direktorat PSDP

dalam mengelola anggaran, dukungan dan koordinasi yang baik dari Sekretariat Ditjen. PSDKP serta Instansi lain yang terkait, sehingga pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik.

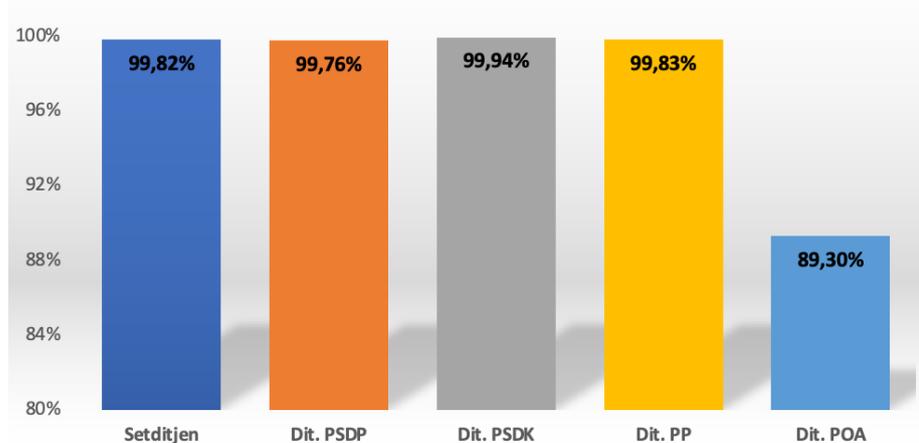
Tabel 3.28. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian								
Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat PSDP (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	99,4	99,76

Apabila dibandingkan dengan unit kerja Eselon II Ditjen PSDKP, Direktorat PSDP menduduki urutan ke-4 diungguli oleh Direktorat PSDK, Direktorat PP, dan Sekretariat PSDKP.

Grafik 3.21. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP

### Perbandingan Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2024



Berdasarkan capaian pada tahun anggaran 2024 ini, Direktorat PSDP berupaya mempertahankan performa ini, dan selalu meningkatkan kinerja tim keuangan untuk tetap kompak sehingga dapat dipertahankan di tahun anggaran selanjutnya.

Pengelolaan anggaran ini ditunjang dengan keaktifan tim keuangan dalam mengikuti Bimtek perbendaharaan dan sering melakukan konsultasi kepada tim Sekretariat maupun KPPN untuk mengatasi kendala yang sedang dihadapi.

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Direktorat PSDP memiliki alokasi anggaran awal TA 2024 sebesar Rp11,768,640,000 (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Setelah mengalami *Automatic Adjustment* (AA) 1 kali kemudian dana tersebut dialihkan ke satuan kerja lain sehingga total anggaran Direktorat PSDP menjadi Rp10,068,640,000 (Sepuluh Miliar Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp10,044,230,701 (Sepuluh Miliar Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Rupiah) atau 99,76% dari pagu anggaran. Pada tahun 2024 telah dilakukan revisi POK sebanyak 9 kali dan diperoleh nilai efisiensi sebesar 9,54%.

### 3.4 EFISIENSI

Guna meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan serta memberikan pelayanan yang prima kepada *stakeholder*, telah dilakukan upaya penggunaan sumber daya secara maksimal pada tahun 2024. Sumber daya yang sangat mendukung efisiensi pencapaian target setiap indikator kinerja adalah penggunaan anggaran. Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Berdasarkan hasil pengukuran mandiri, nilai efisiensi penggunaan anggaran Direktorat PSDP adalah 9,60%. Capaian nilai efisiensi ini didukung oleh tingkat penyerapan anggaran dengan persentase 99,76%. Rincian efisiensi anggaran pada setiap kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sebagaimana terlampir.

Tabel 3.29. Efisiensi Anggaran Direktorat PSDP Tahun 2024

Sasaran Kinerja	Nilai Efisiensi
SK1. Terselenggaranya Penyadartahuan Masyarakat Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang Efektif	0,03%
SK2. Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	3,49%
SK3. Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	6,02%
SK4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP	0,06%
<b>Total Efisiensi</b>	<b>9,60%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Direktorat PSDP pada periode tahun bersangkutan, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun kesimpulan dan saran kegiatan penyusunan laporan kinerja Tahun 2024 adalah:

#### **1.1. Kesimpulan**

- a. Periode Tahun 2024 Direktorat PSDP telah berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan dengan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,22%.
- b. Terdapat beberapa capaian indikator kinerja yang menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023, diantaranya:
  - Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab.
  - Nilai keandalan sistem pengawasan kapal perikanan (eSLO).
  - Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan substansi teknis dalam sanksi administrasi perikanan.
  - Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PSDP.
  - Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PSDP.

#### **1.2. Saran**

- a. Melakukan evaluasi teknis penyelenggaraan kegiatan penyadartahuan tahun 2024.
- b. Koordinasi/sosialisasi terhadap penggunaan sistem apabila terdapat penyempurnaan atau penyesuaian sistem.

- 
- c. Menyelesaikan tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan yang belum diselesaikan pada tahun 2024.
  - d. Melakukan evaluasi teknis penyelenggaraan kegiatan Bimtek tahun 2024.
  - e. Melakukan koordinasi penyusunan Manajemen Risiko periode tahun 2025.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drama Panca Putra

Jabatan : Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Adin Nurawaluddin

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, <sup>23</sup> Januari 2024

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

PIHAK PERTAMA  
Direktur Pengawasan Pengelolaan  
Sumber Daya Perikanan

Drama Panca Putra

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif	1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab (Nilai)	74
SK2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	2	Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen perikanan (%)	80
SK3	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	3	Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional (Nilai)	100
		4	Nilai kualitas penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat Sumber daya perikanan (Nilai)	81
		5	Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan (%)	60
		6	Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan substansi teknis dalam sanksi administrative (%)	80
		7	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP (Nilai)	80
		8	Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO) (Nilai)	75
		9	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan (%)	100
		10	Tingkat pemahaman peserta Bimtek Pengawasan Pengelolaan SDP (Nilai)	78
		11	Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Inovasi)	1
		SK4	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	13 Nilai Pengawasan kearsipan Internal lingkup Direktorat PPSDP (Nilai)	75
	14 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDP (Indeks)	82
	15 Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PPSDP (Nilai)	84
	16 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
	17 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	21
	18 Persentase unit kerja yang menerapkan Sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDP (%)	94
	19 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDP (%)	80
	20 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDP (%)	80
	21 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PPSDP (%)	99,4

**Data Anggaran**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	11.768.640.000
<b>Total Anggaran Direktorat PPSDP Tahun 2024</b>		<b>11.768.640.000</b>

Jakarta, 23 Januari 2024

**PIHAK KEDUA**  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

**PIHAK PERTAMA**  
Direktur Pengawasan Pengelolaan  
Sumber Daya Perikanan



Drama Panca Putra



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ditjenpsdkp@kkp.go.id](mailto:ditjenpsdkp@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT PENGAWASAN  
SUMBER DAYA PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halid K. Jusuf  
Jabatan : Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono  
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2024

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA  
Direktur Pengawasan  
Sumber Daya Perikanan

Halid K. Jusuf

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT PENGAWASAN  
SUMBER DAYA PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan sumber daya perikanan yang efektif	1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab (Nilai)	74
SK2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	2	Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen perikanan (%)	80
SK3	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	3	Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional (Nilai)	100
		4	Nilai kualitas penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat Sumber daya perikanan (Nilai)	81
		5	Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan (%)	60
		6	Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan substansi teknis dalam sanksi administrative (%)	80
		7	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP (Nilai)	80
		8	Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO) (Nilai)	75
		9	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan (%)	100
		10	Tingkat pemahaman peserta Bimtek Pengawasan SDP (Nilai)	78
		11	Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Inovasi)	1
		SK4	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	13
14	Nilai Pengawasan kearsipan Internal lingkup Direktorat PSDP (Nilai)			75

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		15 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PSDP (Indeks)	82
		16 Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PSDP (Nilai)	84
		17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70
		19 Persentase unit kerja yang menerapkan Sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PSDP (%)	94
		20 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PSDP (%)	80
		21 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PSDP (%)	80
		22 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PSDP (%)	99,4

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	11.768.640.000
<b>Total Anggaran Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tahun 2024</b>		<b>11.768.640.000</b>

Jakarta, 30 Desember 2024

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA  
Direktur Pengawasan  
Sumber Daya Perikanan



Halid K. Jusuf



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

# **PIAGAM PENGHARGAAN**

NOMOR B.2758/PSDKP.1/KP.510/V/2024

Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih Diberikan Kepada:

## **Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan**

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023  
sebesar 94,61 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan)



Jakarta, 17 Mei 2024

**Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,**

**Ir. SUHARTA, M.Si**

